



WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR **26** TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DANA DESA  
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19), jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KOTA SAWAHLUNTO TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.36.595.745.800,-(Tiga puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus rupiah). Dengan rincian masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi berdasarkan ketentuan :

- a. 90% (Sembilan puluh perseratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara merata kepada seluruh Desa sebagai alokasi dasar.
- b. 10% (Sepuluh perseratus) dari total Alokasi Dana Desa dibagi secara proporsional berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis yang disebut *variabel independent*.

Pasal 3

Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto Tahun 2016, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada kelompok Belanja Tidak Langsung.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto,  
pada tanggal 16 September 2015  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto,  
pada tanggal 16 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR ..... 26

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 26 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2015  
 TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DANA  
 DESA KOTA SAWAHLUNTO  
 TAHUN ANGGARAN 2016

No	Nama Desa	Jumlah Dana (Rp)
<b>A</b>	<b><u>Kecamatan Silungkang</u></b>	<b>6,949,776,100.00</b>
1	Desa Silungkang Oso	1,390,259,400.00
2	Desa Silungkang Duo	1,344,889,900.00
3	Desa Silungkang Tigo	1,381,801,600.00
4	Desa Muaro Kalaban	1,501,207,500.00
5	Desa Taratak Bancah	1,331,617,700.00
<b>B</b>	<b><u>Kecamatan Lembah Segar</u></b>	<b>6,669,004,300.00</b>
1	Desa Lunto Timur	1,350,024,600.00
2	Desa Lunto Barat	1,322,630,700.00
3	Desa Kubang Tengah	1,347,380,000.00
4	Desa Kubang Utara Sikabu	1,318,571,900.00
5	Desa Pasar Kubang	1,330,397,100.00
<b>C</b>	<b><u>Kecamatan Barangin</u></b>	<b>8,343,831,900.00</b>
1	Desa Santur	1,381,753,100.00
2	Desa Kolok Mudik	1,298,686,000.00
3	Desa Kolok Nan Tuo	1,333,169,800.00
4	Desa Talago Gunung	1,382,624,700.00
5	Desa Lumindai	1,570,709,500.00
6	Desa Balai Batu Sandaran	1,376,888,800.00
	<b><u>Kecamatan Talawi</u></b>	<b>14,633,133,500.00</b>
1	Desa Talawi Hilir	1,359,731,200.00
2	Desa Talawi Mudik	1,334,113,700.00
3	Desa Bukit Gadang	1,329,019,000.00
4	Desa Batu Tanjung	1,370,640,700.00
5	Desa Kumbayau	1,357,718,200.00
6	Desa Tumpuk Tengah	1,370,323,500.00
7	Desa Datar Mansiang	1,302,673,500.00
8	Desa Sijantang Koto	1,301,221,400.00
9	Desa Salak	1,299,117,000.00
10	Desa Sikalang	1,307,467,200.00
11	Desa Rantih	1,301,108,100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,595,745,800.00</b>

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF